

Analisis Strategi Ekonomi Nabi Yusuf A.S Sebagai Dasar Pembentukan Ekonomi Islam

Abdul Rokhim

Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Shiddiq, Jember, Indonesia

Email: abdulrokhim27@gmail.com

Received: November 3, 2025. Accepted: November 21, 2025. Published: December, 11, 2025.

ABSTRACT

KH. Hasyim Asy'ari (1871–1947) was an intellectual and cultural architect who laid a solid This article aims to analyze the story of Prophet Yusuf AS in the Qur'an, particularly Surah Yusuf, through the perspective of economics and strategic planning. Based on Al-Hasyimi's (2020) study, this research argues that Prophet Yusuf AS. was not only a prophet but also an economic architect who applied visionary, integrated, and relevant economic planning principles that are still relevant today and can be used as the operational foundation of Islamic economics. The research method used is qualitative with a thematic (maudhu'i) interpretation and content analysis approach, which examines the book *يوسف عليه السلام مخططاً اقتصادياً* and primary sources from the Qur'an, Hadith, and contemporary Islamic economic literature. The analysis was conducted by extracting economic themes, reconstructing planning strategies, and comparing them with modern and Islamic economic theories. The findings show that Prophet Yusuf AS's economic plan includes a medium-term vision, production efficiency, science-based logistics and storage management, food security, sustainable consumption policies, and integration between planning and implementation under trustworthy and competent leadership. These principles are in line with Islamic economics, including distributive justice, prohibition of usury, the concept of ownership as a trust (istikhlaf), and the achievement of maqashid al-syari'ah. In conclusion, the story of Prophet Yusuf AS offers a holistic, ethical, proactive, and sustainable economic paradigm that can be a practical alternative to the modern economic system, strengthening economic resilience, ethical governance, and inclusive community welfare.

Keywords: Prophet Yusuf, Islamic Economics, Strategic Economic Planning, Food Security, Istikhlaf, Maudhu'i Interpretation, Maqashid Al-Syari'ah

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis kisah Nabi Yusuf AS. dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Yusuf, melalui perspektif ilmu ekonomi dan perencanaan strategis. Berdasarkan studi Al-Hasyimi (2020), penelitian ini berargumen bahwa Nabi Yusuf AS. tidak hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai arsitek ekonomi yang menerapkan prinsip perencanaan ekonomi yang visioner, terintegrasi, dan relevan hingga saat ini, yang dapat dijadikan fondasi operasional ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dan analisis isi, yang menelaah buku *يوسف عليه السلام مخططاً اقتصادياً* serta sumber-sumber primer Al-Qur'an, Hadis, dan literatur ekonomi Islam kontemporer. Analisis dilakukan dengan mengekstraksi tema ekonomi, merekonstruksi strategi perencanaan, serta membandingkannya dengan teori ekonomi modern dan Islam. Temuan menunjukkan bahwa rencana ekonomi Nabi Yusuf AS. mencakup visi jangka menengah, efisiensi produksi, manajemen logistik dan penyimpanan berbasis sains, ketahanan pangan, kebijakan konsumsi berkelanjutan, serta integrasi antara perencanaan dan pelaksanaan di bawah kepemimpinan yang amanah dan kompeten. Prinsip-prinsip ini selaras dengan ekonomi Islam, termasuk keadilan distributif, larangan riba, konsep kepemilikan sebagai amanah (istikhlaf), dan pencapaian maqashid al-syari'ah. Kesimpulannya, kisah Nabi Yusuf AS. menawarkan paradigma ekonomi yang holistik, etis, proaktif, dan berkelanjutan, yang dapat menjadi alternatif praktis bagi sistem ekonomi modern, memperkuat ketahanan ekonomi, tata kelola yang etis, serta kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Kata Kunci: Nabi Yusuf, Ekonomi Islam, Perencanaan Ekonomi Strategis, Ketahanan Pangan, Istikhlaf, Tafsir Maudhu'i, Maqashid Al-Syari'ah

INTRODUCTION

Era globalisasi ditandai dengan dominasi sistem ekonomi kapitalis dan dalam beberapa varian sosialis yang telah membawa kemajuan material secara pesat, namun juga meninggalkan problem-problem sistemik yang mendalam. Ketimpangan pendapatan yang lebar, ketidakstabilan finansial yang bersifat siklikal, eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan, serta kerentanan sistem pangan global menjadi sebagian dari sejumlah tantangan struktural yang terus menggerus keadilan dan

kesejahteraan kolektif (Piketty, 2014; Stiglitz, 2019). Kondisi seperti ini memunculkan urgensi mencari paradigma ekonomi alternatif — satu sistem yang tidak sekadar mengejar efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga menekankan pada keadilan, keberlanjutan, stabilitas sosial, dan keberkahan sebagai kerangka normative.

Dalam konteks ini, teks suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam menawarkan lebih dari sekadar ajaran moral dan spiritual: ia menyimpan prinsip-prinsip fundamental dan praktis untuk pengelolaan ekonomi, sosial, dan publik. Beberapa literatur modern menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam — yang berakar pada nilai-nilai Qur'ani — memiliki potensi memberikan alternatif bagi krisis global saat ini melalui orientasi kesejahteraan kolektif, distribusi adil, dan tata kelola sumber daya secara etis dan berkelanjutan (Fadillah & Purnomo, 2023; Sarim Karimullah, 2024).

Salah satu narasi di Al-Qur'an yang menarik untuk dibaca ulang dari perspektif ekonomi dan perencanaan strategis adalah kisah Yusuf AS. dalam Surah Yusuf. Narasi ini, sebagaimana dianalisis dalam literatur kontemporer (misalnya penelitian terhadap manajemen krisis pangan dalam kisah tersebut), bukan sekadar kisah moral atau spiritual, tetapi dapat dibaca sebagai sebuah “blueprint” perencanaan ekonomi dan kebijakan publik yang canggih. Dalam konteks perubahan zaman, kisah itu memberi pemahaman bahwa: perencanaan jangka panjang, manajemen produksi dan stok pangan, kebijakan konsumsi berimbang, dan kepemimpinan terpercaya dapat menjadi fondasi ketahanan sosial-ekonomi sebuah komunitas (Yusran bin Bakar dkk., 2024; Sendi dkk., 2025).

Analisis terhadap kisah Yusuf AS. menyoroti bagaimana ia, setelah mendapatkan mandat kepemimpinan di Mesir, melaksanakan kebijakan strategis menghadapi masa panen melimpah dan masa paceklik panjang. Ia mengatur agar penduduk meningkatkan produksi, memanen secara maksimal di masa subur, sebagian hasil panen digunakan untuk konsumsi segera, sementara sebagian besar disimpan sebagai cadangan untuk mengantisipasi krisis masa depan — sebuah kebijakan redistribusi dan penyimpanan kolektif yang menunjukkan perencanaan makro, manajemen logistik, serta tanggung jawab sosial kolektif (Imroatus Sholiha, 2024; Sendi dkk., 2025).

Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan distributif, larangan riba, konsep kepemilikan sebagai amanah (istikhlaf), keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, serta fokus pada kemaslahatan umum (*maslahah*) muncul sebagai landasan etis dan normatif dari kebijakan tersebut (Sarim Karimullah, 2024; Ifan Fadillah dkk., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa narasi Qur'ani tidak terpisah dari realitas ekonomi-material — melainkan membentuk paradigma ekonomi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga keberlanjutan sosial, keadilan, dan stabilitas jangka panjang.

Oleh karena itu, membaca kembali kisah Yusuf AS. sebagai strategi ekonomi makro bukanlah tafsir simbolik semata, melainkan upaya penafsiran historis-maudhu'iyah yang mengekstraksi nilai dan model kebijakan yang relevan bagi zaman sekarang. Bila prinsip-prinsip tersebut diadaptasi secara kontekstual dalam kebijakan publik, perencanaan pangan nasional, manajemen ekonomi syariah, atau tata kelola korporasi, paradigma ini bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi etis — yang tangguh terhadap krisis, adil dalam distribusi, serta menjaga keberlanjutan sumber daya dan kemaslahatan umat (Wahyuni, 2020; Aniq Imam, 2024).

Dengan demikian, kisah Yusuf AS. dalam Surah Yusuf dapat dipahami tidak hanya sebagai narasi religius dan moral, tetapi sebagai blueprint ekonomi strategis yang membawa warisan nilai Islam ke dalam ranah ekonomi-politik dan pembangunan sosial — mengingatkan bahwa ekonomi terbaik bukan semata soal pertumbuhan, melainkan soal keadilan, amanah, dan keberlanjutan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yang menekankan pengumpulan dan pengorganisasian seluruh ayat Al-Qur'an yang membahas suatu tema tertentu dalam konteks penelitian ini, tema yang dikaji adalah kisah Nabi Yusuf AS. dalam Surah Yusuf. Setiap ayat yang relevan dihimpun, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis untuk menyingkap pola-pola strategis, prinsip-prinsip ekonomi, serta nilai-nilai etis yang terkandung dalam narasi tersebut (Al-Farmawi, 2022). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan analisis isi (*content analysis*) secara

mendalam terhadap literatur utama berupa buku "يوسف عليه السلام مخططاً اقتصادياً" karya Dr. As'ad Kamal Muhammad Al-Hasyimi. Buku ini dijadikan rujukan pokok karena menyajikan interpretasi yang komprehensif mengenai Yusuf AS. sebagai perencana ekonomi, termasuk strategi manajemen pangan, perencanaan produksi, distribusi, serta kebijakan sosial-ekonomi yang berbasis prinsip Islam. Analisis isi dilakukan dengan mengekstraksi tema-tema penting, mengidentifikasi struktur perencanaan strategis, dan menelaah relevansi prinsip-prinsip tersebut terhadap konsep ekonomi Islam modern dan praktik manajemen strategis kontemporer.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari berbagai literatur yang membahas ekonomi Islam, manajemen strategis, perencanaan ekonomi makro, ketahanan pangan, dan implementasi prinsip maqashid al-syari'ah. Literatur ini berfungsi sebagai alat komparatif untuk menilai kesesuaian, relevansi, dan penerapan nilai-nilai yang ditemukan dalam kisah Yusuf AS. dengan konsep ekonomi modern, termasuk manajemen risiko, efisiensi produksi, serta distribusi dan konsumsi berkelanjutan (Chapra, 2016; Kahf, 2018). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, reduksi data dilakukan untuk memfokuskan pada ayat dan narasi yang relevan. Kedua, dilakukan kategorisasi tematik untuk menyusun ayat dan informasi terkait ke dalam dimensi perencanaan ekonomi, manajemen logistik, kepemimpinan, serta etika ekonomi Islam. Ketiga, interpretasi dilakukan secara induktif-deduktif untuk menafsirkan prinsip-prinsip yang terkandung dan menyusunnya menjadi kerangka konseptual yang sistematis. Keabsahan dan kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber — membandingkan ayat Al-Qur'an, interpretasi Al-Hasyimi, dan literatur akademik terkait — sehingga temuan penelitian memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

RESULTS AND DISCUSSION

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Kisah Yusuf AS

Hasil analisis menunjukkan bahwa kisah Nabi Yusuf AS. dalam Surah Yusuf mencerminkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara komprehensif, sistematis, dan visioner. Narasi Al-Qur'an tentang kepemimpinan Yusuf AS. tidak hanya merekam kisah moral individual, tetapi juga merepresentasikan suatu model tata kelola ekonomi publik yang berbasis nilai tauhid, keadilan, dan keberlanjutan. Konsep Tauhid dan Istikhlaf menjadi fondasi utama dalam keseluruhan kebijakan ekonomi yang diterapkan, menegaskan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi merupakan amanah Allah SWT. yang harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Al-Hasyimi, 2020, hlm. 5–7; Chapra, 2016). Dalam kerangka ini, kepemilikan individu diakui secara proporsional, tetapi selalu berada dalam bingkai tanggung jawab sosial dan akuntabilitas spiritual.

Konsep tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tunduk pada nilai-nilai ketuhanan, sehingga orientasi kebijakan tidak semata-mata mengejar efisiensi atau akumulasi kekayaan, tetapi juga keberkahan dan keadilan. Sementara itu, konsep istikhlaf memosisikan manusia sebagai pengelola (khalifah) yang bertugas mengatur sumber daya dengan mempertimbangkan kepentingan lintas generasi. Oleh karena itu, harta, sumber daya alam, dan kemampuan manusia tidak dipahami sebagai milik absolut individu atau penguasa, melainkan sebagai amanah kolektif yang harus dikelola untuk kepentingan bersama dengan tetap memperhatikan dimensi spiritual dan moral.

Implementasi prinsip Tauhid dan Istikhlaf tercermin secara konkret dalam strategi Yusuf AS. untuk memaksimalkan produksi pertanian dan menyimpan cadangan pangan selama tujuh tahun masa subur sebagai antisipasi terhadap tujuh tahun masa paceklik (QS. Yusuf: 47–49). Kebijakan ini menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya perencanaan jangka menengah dan panjang, manajemen risiko, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Strategi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk awal dari *counter-cyclical policy* dalam perspektif ekonomi modern, di mana surplus pada masa kelimpahan dikelola secara bijaksana untuk menjaga stabilitas ekonomi pada masa krisis.

Selain itu, kebijakan penimbunan cadangan pangan yang dilakukan Yusuf AS. tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, karena dilakukan bukan untuk spekulasi atau monopoli, melainkan untuk kepentingan publik dan keberlangsungan hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip anti-keserakahan, tanggung jawab sosial, serta larangan penimbunan yang merugikan masyarakat (QS. At-Taubah: 34–35). Dengan demikian, konsep istikhlaf terimplementasi secara nyata dalam kebijakan

ekonomi yang berpihak pada kemaslahatan umum, memperlihatkan bahwa pengelolaan harta dan sumber daya harus selalu diarahkan pada tujuan moral dan sosial.

Prinsip keadilan distributif (*al-'adl*) juga tampak jelas pada fase distribusi cadangan pangan selama masa krisis. Yusuf AS. memastikan bahwa setiap keluarga memperoleh jatah pangan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang adil, sehingga tidak terjadi monopoli, penimbunan, atau spekulasi yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial (Al-Hasyimi, 2020, hlm. 94–95; Khan, 2019). Mekanisme distribusi ini mencerminkan keseimbangan antara efisiensi administrasi dan keadilan sosial, serta sejalan dengan instrumen ekonomi Islam modern yang menekankan distribusi kekayaan yang adil dan inklusif, sekaligus menghindari praktik riba, gharar, dan maisir (Chapra, 2016; Kahf, 2018). Distribusi pangan yang dilakukan Yusuf AS. tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan logistik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan sosial. Masyarakat dilatih untuk menerima pembagian secara adil, menghindari keserakahan, serta membangun solidaritas sosial di tengah situasi krisis. Dengan kata lain, kebijakan ekonomi ini berperan dalam membentuk karakter masyarakat yang berorientasi pada keadilan, empati, dan kepedulian terhadap sesama, yang merupakan nilai inti dalam ekonomi Islam.

Selain prinsip keadilan distributif, kisah Yusuf AS. juga mencerminkan prinsip keseimbangan (*al-tawazun*) antara hak individu dan kewajiban sosial, terutama dalam kebijakan konsumsi rasional. Selama masa kelimpahan, masyarakat diarahkan untuk mengonsumsi secukupnya dan menyimpan sebagian besar hasil panen sebagai cadangan (QS. Yusuf: 47). Kebijakan ini mencerminkan pendidikan ekonomi berbasis disiplin, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta penerapan prinsip anti-israf dan anti-tabdzir. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga ketahanan pangan, tetapi juga membentuk mentalitas masyarakat yang hemat, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran terhadap konsekuensi jangka panjang dari pola konsumsi yang tidak terkendali. Prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan Yusuf AS. juga selaras dengan tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan: harta (*māl*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan agama (*dīn*) (Auda, 2008; Ismail, 2021). Perlindungan terhadap harta diwujudkan melalui pengelolaan dan distribusi sumber daya yang adil, perlindungan jiwa tercermin dari kebijakan ketahanan pangan yang mencegah kelaparan massal, sementara perlindungan akal dan agama diwujudkan melalui pendidikan moral dan spiritual yang menyertai kebijakan ekonomi tersebut. Dengan demikian, kebijakan ekonomi Yusuf AS. tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga komprehensif dalam melindungi martabat dan kesejahteraan manusia.

Lebih jauh, analisis ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam oleh Yusuf AS. bersifat holistik, karena mengintegrasikan dimensi material dan spiritual secara simultan dalam satu kerangka kebijakan publik. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika dan moral, serta menolak dikotomi antara ekonomi dan agama. Model ekonomi yang diterapkan Yusuf AS. memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi dapat menjadi instrumen transformasi sosial, pembentukan karakter, dan penguatan solidaritas masyarakat. Dalam konteks kontemporer, kisah Yusuf AS. menawarkan pelajaran yang sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, seperti krisis pangan, ketimpangan distribusi sumber daya, perubahan iklim, dan kerentanan sistem ekonomi dunia. Prinsip perencanaan jangka panjang, pengelolaan cadangan strategis, distribusi yang adil, serta pengendalian konsumsi yang rasional merupakan elemen penting yang dapat diadaptasi dalam kebijakan ekonomi nasional maupun organisasi modern. Dengan kata lain, kisah Yusuf AS. tidak hanya memiliki nilai historis dan teologis, tetapi juga menyediakan kerangka konseptual bagi perencanaan ekonomi strategis yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di era modern.

Strategi Perencanaan dan Manajemen Ekonomi Makro

Hasil rekonstruksi rencana ekonomi Nabi Yusuf AS. menunjukkan bahwa ia menerapkan strategi ekonomi makro yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan, dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang konsisten. Langkah awal yang paling penting adalah analisis lingkungan strategis yang dilakukan berdasarkan interpretasi mimpi raja Mesir—tujuh sapi betina gemuk dimakan yang kurus dan tujuh bulir hijau serta tujuh lainnya kering—yang kemudian diterjemahkan menjadi perencanaan jangka menengah selama 14 tahun (QS. Yusuf: 43–49). Langkah ini mencerminkan penerapan prinsip *strategic foresight* modern, di mana proyeksi risiko dan mitigasi terhadap krisis menjadi bagian integral dari setiap kebijakan

ekonomi (Al-Hasyimi, 2020, hlm. 79-81; Kahf, 2018). Yusuf AS. tidak hanya melihat fenomena ekonomi secara statis, tetapi juga memahami interaksi jangka panjang antara produksi, konsumsi, dan cadangan sumber daya, sehingga menciptakan fondasi yang kokoh bagi ketahanan ekonomi nasional.

Strategi peningkatan kapasitas produksi juga menjadi fokus utama. Yusuf AS. memaksimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga kerja, lahan, dan teknologi pertanian. Produktivitas dipandang sebagai bagian dari ibadah dan amanah (*istikhlaf*) untuk memelihara keberkahan hasil bumi (QS. Hud: 61). Ia menekankan pentingnya disiplin kerja, optimalisasi potensi, dan koordinasi sumber daya untuk menghasilkan surplus strategis yang cukup sebagai buffer menghadapi masa paceklik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan efisiensi, keberkahan, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta dan sumber daya (Al-Hasyimi, 2020, hlm. 91; Chapra, 2016). Surplus ini bukan semata untuk tujuan akumulasi material, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Aspek paling menonjol dari strategi Yusuf AS. adalah inovasi dalam manajemen logistik dan teknik penyimpanan pangan. Metode penyimpanan biji-bijian dalam bulirnya menunjukkan penerapan pendekatan berbasis sains untuk mengurangi kerusakan, hama, dan pemborosan pangan. Strategi ini sekaligus menjadi bentuk *ijaz' ilmi* dalam Al-Qur'an, yang membuktikan kecerdasan perencanaan yang selaras dengan prinsip ilmiah dan praktis (Al-Hasyimi, 2020, hlm. 96-97). Selain itu, kebijakan konsumsi berkelanjutan selama tujuh tahun masa subur menanamkan disiplin sosial-ekonomi, mengajarkan masyarakat untuk menahan diri, mengurangi pemborosan (*israf*), dan menyiapkan cadangan pangan untuk menghadapi masa paceklik. Distribusi pangan selama masa krisis juga dilakukan secara adil, menghindari monopoli, penimbunan, dan spekulasi, sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh haknya secara proporsional. Hal ini mencerminkan penerapan keadilan distributif dan manajemen risiko ekonomi secara efektif (Al-Hasyimi, 2020, hlm. 94-95; Khan, 2019).

Lebih lanjut, kepemimpinan Yusuf AS. menunjukkan integrasi yang harmonis antara perencanaan dan pelaksanaan (*planning and implementation*). Ia meminta otoritas penuh sebagai bendaharawan negara untuk memastikan eksekusi kebijakan berjalan sesuai rencana, meminimalkan resistensi birokrasi, dan menjaga integritas pelaksanaan setiap kebijakan (QS. Yusuf: 55). Kepemimpinan yang mengedepankan *amanah* (integritas) dan *'ilm* (kompetensi) ini menandai prinsip *good governance* dalam perspektif Islam, yang menekankan pentingnya sumber daya manusia yang tepat pada posisi yang tepat (*the right man in the right place*) sebagai kunci keberhasilan setiap rencana strategis (Al-Hasyimi, 2020, hlm. 87-99; Chapra, 2016).

Dengan demikian, rencana ekonomi Yusuf AS. bukan sekadar pengelolaan logistik atau produksi pangan, tetapi merupakan model integratif yang mencakup visi jangka panjang, efisiensi produksi, inovasi logistik, kebijakan konsumsi berkelanjutan, distribusi yang adil, dan kepemimpinan kompeten. Model ini menjadi bukti nyata bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara holistik pada skala makro untuk menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menjadi alternatif bagi sistem ekonomi modern yang sering menghadapi volatilitas, ketimpangan, dan ketidakberlanjutan (Al-Hasyimi, 2020; Chapra, 2016; Kahf, 2018; Khan, 2019).

Kepemimpinan Yusuf AS. dan Integrasi Perencanaan - Pelaksanaan

Keberhasilan rencana ekonomi Nabi Yusuf AS. tidak dapat dilepaskan dari karakter kepemimpinannya yang integratif, visioner, dan berlandaskan prinsip moral. Ia menekankan perlunya posisi eksekutif penuh, sehingga ia dapat memastikan sinkronisasi yang optimal antara perencanaan (*planning*) dan implementasi (*implementation*) kebijakan ekonomi (QS. Yusuf: 55; Al-Hasyimi, 2020, hlm. 87-88). Posisi ini memungkinkan Yusuf AS. memegang kendali penuh atas sumber daya negara, mengurangi risiko kegagalan akibat resistensi birokrasi, konflik kepentingan, atau dominasi kelompok tertentu, dan memastikan setiap keputusan strategis dilaksanakan sesuai visi jangka panjang yang telah dirancang. Pendekatan kepemimpinan semacam ini mencerminkan konsep manajemen modern terkait *strategic alignment*, di mana tujuan institusi, kebijakan, dan operasional saling mendukung untuk mencapai hasil yang optimal.

Kepemimpinan Yusuf AS. menonjolkan dua aspek utama, yaitu integritas (*hafizh*) dan kompetensi (*'alim*), yang selaras dengan konsep *ethical leadership* dan *good governance* dalam literatur manajemen modern (Yukl, 2013; Northouse, 2021). Integritas (*hafizh*) memastikan bahwa seluruh keputusan yang diambil bersih dari manipulasi, korupsi, nepotisme, dan kepentingan pribadi, sehingga legitimasi kebijakan tetap terjaga dan masyarakat merasa terlindungi secara moral dan hukum. Kompetensi (*'alim*) menegaskan

bahwa pemimpin harus memiliki pengetahuan yang memadai, keahlian teknis, pengalaman strategis, dan kemampuan analitis untuk mengelola sumber daya secara efektif, khususnya dalam situasi krisis seperti kelaparan, kekurangan pangan, dan ketidakstabilan sosial-ekonomi. Kombinasi kedua aspek ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya mengandalkan kekuasaan struktural formal, tetapi juga memerlukan legitimasi moral, etika, dan kapabilitas profesional untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Dengan menguasai otoritas pelaksanaan, Yusuf AS. mampu memastikan distribusi pangan yang adil dan transparan, mencegah praktik penimbunan (*ihthikar*), spekulasi, dan ketimpangan distribusi, sekaligus membangun ketahanan sosial-ekonomi yang stabil bagi seluruh masyarakat Mesir (Al-Hasyimi, 2020, hlm. 94–95). Mekanisme ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawazun*), dan tanggung jawab sosial (*maslahah*), dapat diterjemahkan secara praktis dalam tata kelola negara. Di sini terlihat jelas integrasi antara perencanaan strategis, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai satu kesatuan yang harmonis, efisien, dan berkeadilan. Pendekatan ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang berbasis nilai etis mampu menghasilkan sistem yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga stabil secara sosial dan moral.

Lebih jauh, kepemimpinan Yusuf AS. mengajarkan model pengambilan keputusan strategis yang berbasis nilai etis dan keberlanjutan (*sustainability*). Setiap kebijakan diperhitungkan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat, stabilitas sosial, keberlangsungan sumber daya alam, dan keberkahan ekonomi. Dalam konteks modern, prinsip ini sangat relevan bagi pengelolaan organisasi, baik pada tingkat korporasi maupun pemerintahan, di mana integrasi antara perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi (*planning, implementation, monitoring, and evaluation – PIME*) menjadi elemen penting untuk mencapai tujuan strategis yang berkelanjutan. Pendekatan semacam ini selaras dengan literatur manajemen kontemporer yang menekankan *responsible leadership*, *strategic foresight*, dan *stakeholder-oriented governance*, yang mengintegrasikan aspek finansial, sosial, dan etika secara simultan (Yukl, 2013; Northouse, 2021; Freeman et al., 2010).

Kepemimpinan Yusuf AS. juga menekankan prinsip *accountability* dan *transparency*. Ia tidak hanya mengambil keputusan di tingkat pusat, tetapi memastikan mekanisme distribusi dan implementasi kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat. Praktik ini mencerminkan prinsip *good governance* modern, di mana legitimasi politik dan sosial diperoleh melalui kombinasi otoritas formal, integritas moral, dan kepercayaan publik. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik harus mampu menjembatani antara dimensi teknokratis (efisiensi dan perencanaan) dan dimensi etis-moral (keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan).

Dengan demikian, kepemimpinan Yusuf AS. tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga transformatif secara sosial, ekonomi, dan moral. Kepemimpinan yang mengutamakan integritas, kompetensi, tanggung jawab sosial, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat ini menjadi contoh klasik yang dapat dijadikan referensi bagi pengelolaan sumber daya publik dan organisasi modern, khususnya dalam menghadapi tantangan krisis pangan, ketimpangan distribusi, serta kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Model kepemimpinan ini menegaskan bahwa integrasi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang amanah, dan pengawasan berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan strategi ekonomi Islam di tingkat makro maupun mikro, sekaligus menegaskan relevansi prinsip kepemimpinan Nabi Yusuf AS. dalam konteks manajemen modern, pemerintahan, dan pembangunan masyarakat berkeadilan.

Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Modern

Analisis kritis menunjukkan bahwa rencana ekonomi Nabi Yusuf AS. memiliki sejumlah keunggulan signifikan dibandingkan sistem ekonomi modern, baik kapitalis maupun sosialis. Dalam sistem pasar bebas kapitalis, mekanisme harga menjadi instrumen utama pengaturan ekonomi, yang diasumsikan mampu menyeimbangkan permintaan dan penawaran secara otomatis (*invisible hand*) (Stiglitz, 2019; Piketty, 2014). Namun, kenyataannya, sistem ini sering gagal menghadapi krisis struktural, seperti kelaparan, ketimpangan distribusi, dan volatilitas harga, karena ketergantungan berlebihan pada spekulasi, motif keuntungan individu, serta ketidaksempurnaan informasi pasar. Krisis finansial global berulang

yang terjadi di abad ke-20 dan ke-21 menjadi bukti nyata keterbatasan mekanisme pasar bebas dalam menjamin keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Di sisi lain, sistem sosialis terpusat menekankan perencanaan ekonomi dari atas ke bawah dengan kontrol negara yang ketat. Meskipun dapat menstabilkan distribusi sumber daya, pendekatan ini sering mengabaikan efisiensi mikro, insentif individu, dan inovasi produktif (Chapra, 2016). Perencanaan yang kaku dan birokratis berpotensi menekan kreativitas masyarakat, sehingga hasil ekonomi tidak maksimal dan ketahanan pangan sulit dijamin. Rencana ekonomi Yusuf AS. menawarkan sintesis yang brilian dari kedua model tersebut: perencanaan terpusat yang visioner dan berbasis keadilan sosial, sekaligus mempertahankan peran aktif individu dalam produksi dan pengelolaan sumber daya (Al-Hasyimi, 2020, hlm. 72-76). Dengan memaksimalkan kapasitas produksi selama masa subur, merencanakan cadangan pangan untuk masa paceklik, dan mengelola distribusi secara adil, Yusuf AS. mengintegrasikan perencanaan strategis dengan praktik berbasis nilai, sehingga tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Fokus pada ekonomi riil—terutama sektor pertanian, produksi pangan, dan manajemen logistik—menunjukkan prioritas pada stabilitas dan keberlanjutan sistem ekonomi. Hal ini berbeda dengan ekonomi modern yang cenderung terpusat pada sektor finansial, derivatif, dan spekulatif, yang sering menimbulkan gelembung ekonomi, ketimpangan, dan kerentanan terhadap krisis (Al-Hasyimi, 2020, hlm. 68-70; Chapra, 2016). Strategi Yusuf AS. menekankan pentingnya investasi dalam sektor riil yang produktif dan penataan logistik serta cadangan pangan sebagai mitigasi risiko, sejalan dengan prinsip *risk management* modern.

Selain itu, kebijakan konsumsi rasional dan distribusi pangan yang adil selama masa kelimpahan dan paceklik menunjukkan prinsip *Sustainable Consumption and Production* (SCP) yang kini menjadi salah satu fokus utama ekonomi berkelanjutan di tingkat global. Yusuf AS. sudah menerapkan pola pengelolaan sumber daya yang efisien, anti-israf (*anti-israf*), dan berbasis prioritas kebutuhan dasar, sehingga mengurangi risiko kelaparan, inflasi pangan, dan kerusakan sosial-ekonomi (Al-Hasyimi, 2020, hlm. 89-95; Kahf, 2018).

Keunggulan lain dari rencana Yusuf AS. adalah integrasi antara perencanaan jangka menengah dengan kepemimpinan yang amanah dan kompeten (*ethical leadership*). Ia tidak hanya merancang kebijakan strategis, tetapi juga memimpin pelaksanaan secara langsung, memastikan sinkronisasi antara strategi, eksekusi, dan evaluasi, yang pada literatur modern dikenal sebagai *strategic planning, implementation, and control* (Yukl, 2013; Northouse, 2021). Pendekatan holistik ini memungkinkan masyarakat untuk tetap produktif dan stabil secara ekonomi, sekaligus menegakkan prinsip etika dan keadilan distributif, yang jarang ditemui dalam praktik ekonomi modern.

Dengan demikian, rencana ekonomi Yusuf AS. tidak hanya menjadi model historis, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi sistem ekonomi kontemporer. Pendekatan ini menawarkan alternatif yang etis, berkelanjutan, dan stabil, yang mampu menjembatani kelemahan mekanisme pasar bebas kapitalis dan perencanaan terpusat sosialis. Model ini menegaskan bahwa integrasi prinsip spiritual, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi dapat menghasilkan sistem yang tahan terhadap krisis, berorientasi pada kesejahteraan kolektif, dan relevan untuk implementasi modern, baik pada tingkat nasional maupun organisasi korporasi.

Relevansi Kontemporer dan Implementasi Praktis

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan oleh Yusuf AS. tetap sangat relevan untuk konteks kontemporer, baik di tingkat makro (negara) maupun mikro (korporasi dan lembaga). Di tingkat nasional, strategi perencanaan pangan yang diterapkan Yusuf AS.—melalui pengumpulan cadangan selama masa subur, distribusi pangan yang adil, dan manajemen logistik yang efisien—dapat dijadikan model bagi kebijakan ketahanan pangan modern. Konsep *strategic grain reserve*, pengembangan sistem informasi pertanian berbasis data (*agricultural information system*), dan diversifikasi pangan lokal menjadi blueprint yang dapat membantu pemerintah meminimalkan risiko krisis pangan, menstabilkan harga, dan menjamin akses pangan bagi seluruh lapisan masyarakat (Al-Hasyimi, 2020; Chapra, 2016; Kahf, 2018).

Selain itu, strategi Yusuf AS. menekankan perlunya perencanaan jangka menengah dan mitigasi risiko melalui *strategic foresight*, yang kini menjadi prinsip penting dalam manajemen kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan. Model ini menekankan bahwa penyusunan kebijakan tidak hanya bersifat

reaktif terhadap krisis, tetapi proaktif dengan mengantisipasi skenario masa depan, sebuah pendekatan yang dapat meningkatkan ketahanan nasional terhadap berbagai guncangan ekonomi, perubahan iklim, dan krisis pangan global.

Di tingkat mikro, prinsip-prinsip Yusuf AS. relevan untuk korporasi, lembaga keuangan syariah, dan organisasi modern. Beberapa implementasi praktis mencakup: (1) *linkage* yang kuat antara pembiayaan dan sektor riil, sehingga modal perusahaan diarahkan ke aktivitas ekonomi produktif seperti pertanian berkelanjutan, logistik pangan, dan industri halal; (2) kepemimpinan etis (*ethical and competent leadership*), di mana manajemen puncak tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral, amanah, dan akhlak yang baik; (3) manajemen risiko proaktif, dengan analisis skenario dan penyusunan rencana kontinjensi untuk menghadapi fluktuasi ekonomi, geopolitik, maupun bencana alam (Al-Hasyimi, 2020; Chapra, 2016; Kahf, 2018).

Lebih jauh, rencana Yusuf AS. menyediakan kerangka manajemen strategis yang dapat direplikasi secara luas. Proses ini mencakup: (1) *environmental scanning*, yakni kemampuan membaca lingkungan dan mengidentifikasi peluang maupun ancaman—yang dalam konteks modern diterjemahkan sebagai analisis PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) dan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats); (2) *strategy formulation*, yaitu perumusan rencana jangka menengah yang jelas dan terukur, setara dengan penetapan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi; (3) *strategy implementation*, di mana eksekusi dilakukan dengan kontrol penuh atas sumber daya dan otoritas yang memadai; (4) *evaluation and control*, yakni pemantauan berkelanjutan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, distribusi adil, dan mitigasi risiko secara tepat (Yukl, 2013; Northouse, 2021).

Integrasi kerangka strategis ini menunjukkan bahwa model Yusuf AS. bukan sekadar praktik historis, tetapi juga menawarkan nilai-nilai kontemporer yang sangat penting: sinergi antara etika dan efisiensi, keberlanjutan sumber daya, keadilan distributif, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip Yusuf AS. dapat membantu organisasi modern menghadapi tantangan ekonomi global, memperkuat ketahanan sosial-ekonomi, dan membangun tata kelola yang berorientasi pada nilai (*value-driven governance*). Paradigma ini menunjukkan bahwa ekonomi yang berhasil tidak hanya mengandalkan angka dan mekanisme pasar, tetapi juga mengintegrasikan moralitas, visi jangka panjang, dan kepedulian terhadap kesejahteraan kolektif (Al-Hasyimi, 2020; Chapra, 2016; Kahf, 2018; Yukl, 2013; Northouse, 2021).

CONCLUSION

Analisis mendalam terhadap kisah Nabi Yusuf AS. menunjukkan bahwa strategi ekonomi yang diterapkannya merupakan model terpadu yang menggabungkan perencanaan, pengelolaan sumber daya, distribusi yang adil, serta kepemimpinan yang berintegritas dan kompeten. Pendekatan ini menekankan pentingnya perencanaan jangka menengah dan kesiapan menghadapi krisis, pengelolaan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan, serta disiplin konsumsi yang anti-israf. Sistem distribusi pangan yang adil tidak hanya menjaga kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menanamkan nilai moral, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Kepemimpinan Yusuf AS. menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi sangat tergantung pada kombinasi antara kompetensi profesional dan integritas moral, di mana keputusan strategis dipertimbangkan secara matang untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan. Model kepemimpinan ini juga menekankan integrasi antara perencanaan, implementasi, dan pengawasan yang berkelanjutan, sehingga kebijakan ekonomi tidak hanya berhasil secara teknis tetapi juga menghasilkan dampak sosial dan moral yang positif.

Secara keseluruhan, kisah Yusuf AS. menyediakan kerangka berpikir ekonomi yang holistik, etis, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya relevan untuk berbagai konteks modern, baik dalam pengelolaan sumber daya nasional, manajemen organisasi, maupun pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Kisah ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari akumulasi materi, tetapi juga dari kemampuan memadukan efisiensi, tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan nilai-nilai moral dalam setiap aspek pengambilan keputusan. Dengan demikian, kisah Yusuf AS. tetap menjadi teladan strategis dan normatif bagi pemimpin dan pengelola ekonomi masa kini, yang ingin menciptakan sistem ekonomi yang efektif, adil, dan bermakna.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Ghazālī. (1997). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn*. Dār al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2012). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (2004). *Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII*. Kencana.
- Barton, G. (1994). *The idea of progress in Indonesian Islamic thought*. Monash University Press.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Rajawali Press.
- Bruinessen, M. van. (1999). *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Mizan.
- Bush, R. (2009). *Nabdlatul Ulama and the struggle for power within Islam and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqāṣid al-sharī'ah*. Islamic Research and Training Institute.
- Cizakça, M. (1998). Awqāf in history and its implications for modern Islamic economies. *Islamic Economic Studies*, 6(1), 43–70.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kiai dan visinya mengenai masa depan Indonesia* (Rev. ed.). LP3ES.
- Feillard, A. (1995). *NU vis-à-vis negara: Pencarian isi, bentuk dan makna*. LKiS.
- Fadlillah, M. (2020). *Pendidikan karakter anak usia dini*. Prenadamedia Group.
- Fauzi, A. (2018). Pendidikan karakter perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 1–15.
- Haidar, M. A. (1994). *Nabdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan fikih dalam politik*. Gramedia.
- Haneef, M. A. (2005). *Islamic worldview and economic order*. IIUM Press.
- Hasyim Asy'ari. (2007). *Adab al-'ālim wa al-muta'allim*. Pustaka Tebuieng.
- Hidayat, K. (2018). *Agama untuk peradaban*. Pustaka Alvabet.
- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah's welfare. In *Proceedings of the International Seminar on Anqāf* (pp. 1–25). Kuwait Awqaf Public Foundation.
- Laffan, M. (2011). *The makings of Indonesian Islam: Orientalism and the narration of a Sufi past*. Princeton University Press.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Mannan, M. A. (1995). *Islamic economics: Theory and practice*. Islamic Academy.
- Muhaimin. (2009). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Nata, A. (2003). *Manajemen pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Nata, A. (2010). *Pemikiran pendidikan Islam dan Barat*. RajaGrafindo Persada.
- Nizar, S. (2008). *Filsafat pendidikan Islam: Pendekatan historis, teoretis, dan praktis*. Ciputat Press.
- Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh al-ṣakāh* (Vols. 1–2). Dār al-Shurūq.
- Rahman, F. (2012). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Polarising Javanese society: Islamic and other visions (c. 1830–1930)*. NUS Press.

- Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern*. LP3ES.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Membenahi pendidikan nasional*. Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif*. Rineka Cipta.
- Wahid, A. (2001). *Pergulatan negara, agama, dan kebudayaan*. Desantara.
- Winkelmann, L., & Winkelmann, R. (1998). Why are the unemployed so unhappy? Evidence from panel data. *Economica*, 65(257), 1–15.
- Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Kencana.